

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Sustainable Development Goals* (SDGs), merupakan salah satu program untuk menanggulangi kemiskinan, karena masalah kemiskinan masih terjadi di berbagai belahan dunia, terutama di negara berkembang.<sup>2</sup> SDGs sendiri berkaitan dengan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>3</sup>

Kenyataannya kemiskinan terus menjadi masalah utama di dunia, di berbagai belahan negara masih banyak masyarakat yang mengalami kemiskinan, sehingga menjadi masalah yang sangat serius, khususnya di Indonesia yang menjadi negara berkembang, dengan adanya kemiskinan ini membuat masyarakat Indonesia tidak bisa mencukupi kehidupannya dengan baik. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dan diukur dari sisi

---

<sup>2</sup> Mochamad Dzaki Ansori, "Sustainable Development Goals (SDGs) dan Faktor-Faktor Kemiskinan di Indonesia", *Program Studi Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran*

<sup>3</sup> Khulfi M. Khalwani, Andi Setyo Pambudi dan Bambang Pramujo, *Mangrove untuk SDGs*, (Bogor: IPB Press, 2021), Hal. 2

pengeluaran perkapita atau dengan kata lain kemiskinan dipandang dari sisi ketidakmampuan ekonomi. Tingginya persentase jumlah penduduk miskin dalam suatu wilayah menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat, dikarenakan pendapatan perkapita mereka rendah.<sup>4</sup>

Indonesia sendiri memiliki tujuan pembangunan nasional Negara yaitu salah satunya sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial penduduk negara agar dapat dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial dan ekonominya. Kesejahteraan umum di Indonesia dapat digambarkan salah satunya berdasarkan tingkat kemiskinan penduduk di Indonesia. Berbagai kegiatan pembangunan nasional dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Salah satunya dengan mengarahkan berbagai kegiatan pembangunan ke daerah-daerah, khususnya pembangunan pada daerah yang relatif memiliki penduduk dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Pembangunan sendiri dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program pembangunan jangka pendek dan jangka panjang nasional.

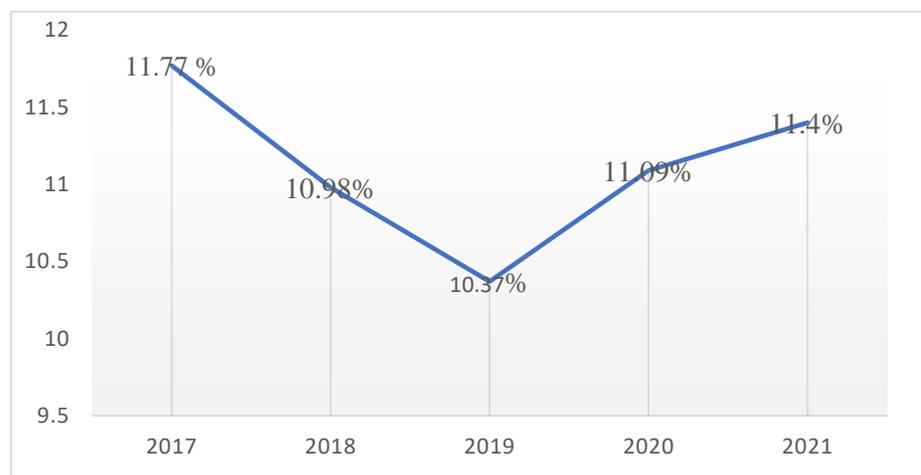
---

<sup>4</sup> Harlik, dkk. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Jambi", *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Vol.1, No.2 Oktober 2013

Indikator utama keberhasilan pembangunan nasional salah satunya adalah menurunnya jumlah penduduk miskin di Indonesia.<sup>5</sup>

Usaha pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan sangatlah serius, bahkan merupakan program prioritas, termasuk bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bagi pemerintah Jawa Timur sendiri kemiskinan yang terjadi masih menjadi masalah yang serius, dapat dilihat dari perhitungan statistik yang menunjukkan tingkat kemiskinan di Jawa Timur masih menunjukkan tingginya kemiskinan yang terjadi, bahkan menjadi isu penghambat dalam pembangunan ekonomi di Jawa Timur yaitu karena masih tingginya tingkat kemiskinan yang terjadi, dapat dilihat pada gambar 1.1:

**Gambar 1.1**  
**Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021**



Sumber Data: Badan Pusat Statistik<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Bagus Haryo Kusumo, “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, Pendidikan dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2019”, *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik, <https://jatim.bps.go.id/indicator/23/497/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur.html>, diakses pada 15 November 2022 pukul 09.00

Dilihat dari Gambar 1.1 menunjukkan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2017, 2018, 2019 mengalami penurunan kemiskinan yang cukup signifikan, penurunan terbesar terjadi pada tahun 2017, dimana persentase turun sebesar 0,79% dari tahun 2017 ke 2018. Namun pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan kembali terhadap persentase penduduk miskin di Jawa Timur, kenaikan mencapai 0,72%, yang selanjutnya mengalami kenaikan kembali sebesar 0,31% di tahun 2021. Hal ini berarti bahwa tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Timur masih mengalami kenaikan, kemiskinan dinilai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, tempat tinggal dan kesehatan. Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil pembangunan tersebut. Tingginya angka kemiskinan inilah yang menempatkan permasalahan kemiskinan menjadi salah satu prioritas dalam setiap pembangunan, meskipun di tahun sebelumnya mengalami penurunan persentase jumlah penduduk miskin, namun belum berarti Jawa Timur telah mengalami perbaikan tingkat kesejahteraannya. Kenaikan tingkat kemiskinan yang terjadi setiap tahunnya karena mahalnya harga bahan pokok yang terus terjadi sehingga masyarakat yang memiliki penghasilan dibawah rata-rata akan sulit dalam memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan hidup yang layak. Kendatipun demikian, berkurangnya jumlah kemiskinan tersebut layaknya harus diwaspadai, karena masih banyak peluang untuk kembali

miskin, ditambah dengan perkembangan zaman seperti saat ini adanya tuntutan global yang mengharuskan seseorang untuk bersaing secara intelektual. Kenaikan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada tahun 2021 karena masih terdapat masyarakat yang belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan dan akibat dari kenaikan harga barang kebutuhan pokok.

Tingkat kemiskinan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya terkait dengan Indeks pembangunan manusia, IPM sendiri memiliki hubungan yang erat dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan. Rendahnya IPM akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Menurut teori *Human Capital* menyatakan bahwa seseorang bisa meningkatkan penghasilan melalui peningkatan pendidikan, yang kemudian akan berdampak pada kesejahteraan nya dan pada akhirnya akan membantu orang tersebut keluar dari masalah kemiskinan.<sup>7</sup> Semakin seseorang memiliki pendidikan yang tinggi maka semakin tinggi pula penghasilan yang akan didapatnya, maka dari itu untuk pemerintah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah tingkat pengangguran terbuka, pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum memperoleh pekerjaan tersebut, tinggi

---

<sup>7</sup> Aisyah Sisnita, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung Periode 2009-2015*, (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Naskah Publikasi Kasrya Ilmiah, 2017), Hal. 4

rendahnya pengangguran dapat dikatakan sangat penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi dan menjadi salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan dari pembangunan<sup>8</sup>, yang artinya banyak masyarakat yang tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya sehingga harus mengurangi kebutuhannya. Ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya karena tidak memiliki pendapatan yang cukup akan mengakibatkan dia berada di bawah garis kemiskinan.

Produk domestik regional bruto juga turut memberikan pengaruh terhadap tingkat kemiskinan, dalam penelitian menggunakan PDRB dikarenakan cakupan wilayahnya provinsi, kota, kabupaten dan kecamatan. PDRB merupakan nilai bersih barang dan jasa pada akhir tahun yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Semakin meningkatnya PDRB menggambarkan bahwa semakin meningkat pula produksi suatu wilayah tersebut, tingginya tingkat PDRB biasanya diiringi makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Karena PDRB yang meningkat di masing-masing wilayah mengindikasikan bahwa pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan.<sup>9</sup>

Selain dari produk domestik regional bruto, upah minimum dan pengangguran memiliki keterkaitan yang cukup erat dimana tingginya upah akan mempengaruhi jumlah penawaran dan permintaan tenaga kerja yang

---

<sup>8</sup> Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2017), Hal. 197

<sup>9</sup> Abdul Rahman Suleman, dan Abdurrozzaq Hasibuan, "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan di Kota Padangsidimpuan", *Jurnal Buletin Utama Teknik*, Vol.17, No.1 September 2021

pada akhirnya akan berdampak pada jumlah pengangguran. Jadi dengan semakin bertambahnya jumlah pengangguran yang terjadi maka akan menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan.

Rasio gini atau ketidakmerataan distribusi pendapatan atau kesenjangan pendapatan dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Menurut tulisannya Rodriguez-Pasodan Hardy menyatakan bahwa ada hubungan positif antara kemiskinan dengan kesenjangan, baik yang sifatnya spasial maupun inter-personal. Lebih lanjut dinyatakan hubungan ini lebih kuat antara kesenjangan antar individu (interpersonal) dengan kemiskinan dibandingkan dengan kesenjangan spasial.<sup>10</sup> Salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur ketimpangan yaitu dengan menggunakan *Gini Ratio*, bahwa *Gini Ratio* berkisar antara 0 sampai dengan 1 yang mana jika nilai *Gini Ratio* semakin mendekati 0 maka distribusi pendapatan terjadi pemerataan dan begitu pun sebaliknya.<sup>11</sup>

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, jumlah penduduk juga termasuk dalam faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Menurut teori Nelson dan Leibstein mengemukakan bahwa terdapat pengaruh langsung antara penambahan penduduk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya Nelson dan Leibstein menunjukkan bahwa penambahan penduduk yang pesat di negara

---

<sup>10</sup> Ahmad Dhea Pratama, "Kemiskinan dan Ketimpangan Pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung", *Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP)*, Vol. 10, No.1 2020

<sup>11</sup> Hendy Pramana Putra, Muhammad Diaudin, dkk, "Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk, Gini Ratio Dan Pertumbuhan PDRB Perkapita Terhadap Angka Kemiskinan di Kota Blitar Tahun 2011-2020", *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Vol. 18, No.2 Tahun 2021

berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perbaikan yang berarti dan dalam jangka panjang akan mengalami penurunan kesejahteraan serta meningkatkan jumlah penduduk miskin. <sup>12</sup>Jumlah penduduk yang terlalu banyak atau kepadatan penduduk yang terlalu tinggi akan menjadi penghambat pembangunan ekonomi di negara berkembang.

Penelitian terdahulu yang membahas terkait tingkat kemiskinan yang dilakukan oleh Hastina Febriaty dan Nurwani<sup>13</sup>, yang menjelaskan bahwa variabel rasio gini, dan PDRB saling memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dimana rasio gini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan tersebut yang terjadi bukan hanya mengurangi keefektifan dari pengaruh pertumbuhan ekonomi, namun akan menaikkan angka kemiskinan. Sedangkan hasil variabel PDRB menunjukkan bahwa pendapatan perkapita merupakan salah satu ukuran kemakmuran bagi tiap daerah. Semakin tinggi pendapatan tersebut maka semakin tinggi daya beli penduduk. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Eka Agustina, Mohd. Nur Syechalad, Abubakar Hamzah<sup>14</sup>, yang menjelaskan bahwa variabel

---

<sup>12</sup> Eka Agustina, Mohd. Nur Syechalad, Abubakar Hamzah, "Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 4, No. 2, September 2018

<sup>13</sup> Hastina Febrianty dan Nurwani, "Pengaruh Gini Ratio, PDRB Perkapita dan Tingkat Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara", *QE Jurnal*, Vol. 06, No.3 Desember 2017

<sup>14</sup> Eka Agustina, Mohd. Nur Syechalad, Abubakar Hamzah, "Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 4, No. 2, September 2018

jumlah penduduk dan tingkat pengangguran memiliki pengaruh yang signifikan, kedua variabel tersebut menunjukkan hubungan yang positif.

Berdasarkan realitas dan fenomena yang terjadi pada pemaparan di atas, serta mengacu pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, pada penelitian ini berfokus pada satu tahun penelitian saja maka dari itu peneliti akan melakukan sebuah penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum, Rasio Gini Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Timur 2021”.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi masalah pada penelitian ini terkait tingkat kemiskinan di Jawa Timur pada tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dari tahun 2018, 2019, 2020, meskipun tingkat kemiskinan di tahun 2021 tidak setinggi di tahun 2017, keadaan ini sudah menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Jawa Timur masih tinggi dari tahun ke tahun. Tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat di wilayah Jawa Timur, dan meningkatnya dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak, sehingga hal ini masyarakat yang miskin akan mengalami kesulitan untuk melakukan persaingan dalam mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut untuk menganalisis pengaruh dari indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, produk domestik regional bruto,

upah minimum, rasio gini, dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi masalah pada penelitian ini terkait tingkat kemiskinan di Jawa Timur pada tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dari tahun 2018, 2019, 2020, meskipun tingkat kemiskinan di tahun 2021 tidak setinggi di tahun 2017, keadaan ini sudah menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Jawa Timur masih tinggi dari tahun ke tahun. Tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat di wilayah Jawa Timur, dan meningkatnya dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak, sehingga hal ini masyarakat yang miskin akan mengalami kesulitan untuk melakukan persaingan dalam mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut untuk menganalisis pengaruh dari indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, produk domestik regional bruto, upah minimum, rasio gini, dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas serta untuk memberikan suatu arah pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan permasalahan yang terkait sebagai berikut:

1. Apakah indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, produk domestik regional bruto, upah minimum, rasio gini, dan jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur tahun 2021?
2. Apakah indeks pembangunan manusia berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur tahun 2021?
3. Apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur tahun 2021?
4. Apakah produk domestik regional bruto berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur tahun 2021?
5. Apakah upah minimum berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur tahun 2021?
6. Apakah rasio gini berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur tahun 2021?
7. Apakah jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur tahun 2021?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah yang dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, produk domestik regional bruto, upah minimum, rasio gini, dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur tahun 2021.

2. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur tahun 2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur tahun 2021.
4. Untuk mengetahui pengaruh produk domestik regional bruto terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur tahun 2021.
5. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur tahun 2021.
6. Untuk mengetahui pengaruh rasio gini terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur tahun 2021.
7. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur tahun 2021.

## **E. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk menunjukkan dan mengetahui hubungan pengaruh antar variabel indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, produk domestik regional bruto, upah minimum, rasio gini dan jumlah penduduk secara teori. Sehingga dapat lebih memahami dan mengerti pentingnya mengetahui kondisi pembangunan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia, dan kemudian diharapkan penelitian ini dapat lebih dikembangkan ke dalam hal-hal yang lebih inovatif dan terbaru.

## **2. Kegunaan Praktis**

### **a. Lembaga**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi indikator yang berguna dalam mempertimbangkan kebijakan-kebijakan dalam upaya untuk pengentasan kemiskinan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Dengan memahami indikator yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan khususnya di Jawa Timur, pemerintah akan lebih mudah memetakan tentang kondisi riil yang terjadi dan dapat mengambil strategi yang tepat dalam melakukan upaya pengentasan masyarakat yang kurang mampu.

### **b. Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih perbendaharaan kepustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk dijadikan sebagai tambahan literatur khususnya bagi mahasiswa Ekonomi Syariah dalam mengkaji pengukuran beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur tahun 2021.

### **c. Penelitian Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan bagi penelitian selanjutnya mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yang memberikan pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur.

## **F. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah**

### **1. Ruang Lingkup**

Obyek penelitian ini pada wilayah Jawa Timur dan berfokus pada variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Variabel bebas (X) dalam penelitian ini meliputi Indeks Pembangunan Manusia ( $X_1$ ), Tingkat Pengangguran Terbuka ( $X_2$ ), Produk Domestik Regional Bruto ( $X_3$ ), Upah Minimum ( $X_4$ ), Rasio Gini ( $X_5$ ), dan Jumlah Penduduk ( $X_6$ ), sedangkan variabel terikat (Y) adalah Tingkat Kemiskinan. Periode yang diteliti pada penelitian ini yaitu tahun 2021.

### **2. Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan pada penelitian ini mengukur 6 variabel bebas yaitu indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, produk domestik regional bruto, upah minimum, rasio gini dan jumlah penduduk. Keterbatasan waktu sehingga peneliti hanya menggunakan tahun 2021 saja.

## **G. Penegasan Istilah**

### **1. Penegasan Konseptual**

#### **a. Tingkat Kemiskinan**

Tingkat kemiskinan merupakan presentase jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan yaitu minimum untuk

memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara<sup>15</sup>. Ukuran yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan adalah berdasarkan dengan tingkat pendapatan. <sup>16</sup> Tingkat kemiskinan juga berarti suatu komunitas berada di bawah satu garis kemiskinan tertentu, kemiskinan juga berarti kekurangan kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang layak.<sup>17</sup>

b. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indeks pembangunan manusia yang digunakan untuk mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/ wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan dan standar hidup layak. Usia harapan hidup mencerminkan usia maksimum yang diharapkan seseorang untuk bertahan hidup.<sup>18</sup>

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang

---

<sup>15</sup><https://dalduk.jogjaprov.go.id/program/peningkatan-kualitas-penduduk-ekonomi/tingkat-kemiskinan.htm>, diakses 1 januari 2023, Pukul 19.13 WIB

<sup>16</sup> Prince Charles Heston Runtunuwu, *Analisis Pertumbuhan Ekonomi & Kemiskinan (Dengan Dynamic Panel Data Simultaneous Method, Studi Kasus di Sulawesi Utara)*, (Sumatra Barat: Mitra Cendekia Media, 2021), Hal. 37

<sup>17</sup> Ali Khomsan, Arya Hadi Dharmawan, dkk, *Indikator Kemiskinan*, (Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia IPB, 2015), Hal. 2

<sup>18</sup> Lilik Suenti, Retno Roebiantoeti dan Mudjiatun, , *Buku Pendamping Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kelas VIII*, (Malang: Media Nusa Creative, 2018), Hal. 49

yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum memperoleh pekerjaan tersebut. Seseorang yang tidak bekerja serta tidak secara aktif mencari pekerjaan bukan tergolong ke dalam pengangguran. Pengangguran atau orang yang menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan.<sup>19</sup>

d. Produk Domestik Regional Bruto

PDRB Secara umum dapat dikatakan bahwa total nilai barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah yang telah dihilangkan unsur-unsur *intermediate cost*-nya. PDRB juga dapat didefinisikan oleh Dumary dalam Aram sebagai agregat ekonomi, maksudnya angka besaran total menunjukkan prestasi ekonomi suatu negara, dalam lingkup yang lebih kecil adalah provinsi/kabupaten/kota, disebut sebagai PDRB. pertumbuhan produksi dari PDRB adalah berupa barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dan dalam selang waktu. Produksi tersebut, diukur dengan nilai tambah yang diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi di wilayah tertentu.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Mayasurru Lasiyama, Frida Ayu Badria, dkk, *Ekonomi dan Bisnis Percikan Pemikiran Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2022), Hal. 60

<sup>20</sup> Aram Palilu, *Pembangunan Infrastruktur Transportasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto*, (Sumatera Barat: CV.Azka Pustaka, 2022), Hal.51

e. Upah Minimum

Upah merupakan salah satu syarat perjanjian kerja yang diatur oleh pengusaha, pekerja/buruh serta pemerintah. Upah adalah jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh pekerja meliputi masa atau syarat- syarat tertentu. Upah memberikan peranan penting dan memberikan ciri khas suatu hubungan yang disebut dengan<sup>21</sup>

f. Rasio Gini

Tingkat kesenjangan kesejahteraan dapat diukur dengan suatu alat indeks yang dikenal dengan Koefisien Gini yang juga sering disebut dengan “*Gini Ratio*” (Rasio Gini).<sup>22</sup>Koefisien Gini (*Gini Ratio*) atau Indeks Gini, adalah ukuran yang dikembangkan oleh statistika Italia, Corrado Gini dan dipublikasikan pada tahun 1912 dalam karyanya, *Variabilita e mutabilita*. Koefisien Gini merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.<sup>23</sup>

g. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk merupakan jumlah keseluruhan penduduk yang menempati seluruh wilayah tertentu. Jumlah Penduduk suatu

---

<sup>21</sup> Zulfikar Putra, Darmawan Wiridin, dan Farid Wajdi, *Implementasi Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Pekerja*, (Malang: Ahlimedia Press, 2022), Hal.15—16

<sup>22</sup> Dodik Ridho Nurrochmat, Dudung Darusman, dan Meti Ekayani, *Kebijakan Pembangunan Kehutanan dan Lingkungan Teori dan Implementasi*, (Bogor: IPB Press, 2016), Hal. 95

<sup>23</sup> Meiki Permana, *Degradasi Lingkungan: Pendekatan Kajian Pembangunan Yang Berkelanjutan*, (Yogyakarta: CV Nas Media Pustaka, 2021), Hal. 29

wilayah dapat diketahui dengan cara mencari data penduduk yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga resmi, seperti kelurahan, kecamatan dan Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah penduduk yang besar merupakan suatu potensi yang luar biasa, tetapi akan menjadi masalah yang kompleks apabila tidak diimbangi dengan kuantitas yang baik.<sup>24</sup>

## 2. Penegasan Operasional

### a. Tingkat Kemiskinan

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang dari ketidakmampuan sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk dikatakan miskin yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan<sup>25</sup> Tingka kemiskinan juga dapat diartikan pendapatan suatu komonitas berada di bawah satu garis kemiskinan tertentu, kemiskinan juga berarti kekurangan kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang layak.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Amir Khosim dan Kun Marlina Lubis, *Geografi untuk SMA/MA Kelas XI*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), Hal. 31

<sup>25</sup> <https://jatim.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>, diakses 21 Desember 2022, Pukul 18:15 WIB

<sup>26</sup> Ali Khomsan, Arya Hadi Dharmawan, dkk, *Indikator Kemiskinan*, (Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia IPB, 2015), Hal. 2

b. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pembangunan ekonomi yang telah dilakukan oleh suatu negara atau daerah mampu meningkatkan taraf hidup atau kualitas manusia. Komponen yang diukur untuk menghitung IPM yang mendasar yaitu, usia hidup, pendidikan dan standar hidup layak.<sup>27</sup> Besarnya IPM dapat dihitung dengan rumus:

$$IPM = \sqrt{1 \text{ Kesehatan} \times 1 \text{ Pendidikan} \times 1 \text{ Pengeluaran} \times 100}^{28}$$

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka merupakan situasi di mana orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka bisa disebabkan karena lapangan pekerjaan yang tidak tersedia, ketidakcocokan antara kesempatan kerja dan latar belakang pendidikan, dan tidak mau bekerja. Untuk menghitung berapa besar tingkat pengangguran terbuka, dapat dilakukan dengan rumus berikut:<sup>29</sup>

$$\frac{\text{Jumlah Pengangguran Terbuka}}{\text{Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

d. Produk Domestik Regional Bruto

PDRB merupakan jumlah keseluruhan nilai tambah barang

---

<sup>27</sup> Arfida Boedirochminarni dan Pera Sundarianingsih, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Malang: UMM Press, 2019), Hal. 8

<sup>28</sup> Lestari Sukarniati, Firsty Ramadhona Amalia Lubis, dan Nurul Azizah Az Zakiyyah, *Ekonomi Pembangunan (Teori dan Tantangan di Negara Berkembang)*, (Yogyakarta: UAD Press, 2021), Hal. 84

<sup>29</sup> Alam S, *Ekonomi Untuk SMA dan MA Kelas XI 2*, (ESIS, 2007), Hal.9

dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang umumnya kurun waktu satu tahun. Dalam menghitung PDRB terdapat empat pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran, dan metode alokasi.<sup>30</sup>

e. Upah Minimum

Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja tidak boleh rendah daripada ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Jika upah lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib membayar upah pekerja atau buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>31</sup>

f. Rasio Gini

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> R. Widodo Dwi Pramono dan Ratna Eka Suminar, *Ekonomi Wilayah Untuk Perencanaan Tata Ruang*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019), Hal. 51

<sup>31</sup> Much. Nurachmad, *Tanya Jawab Seputar Hak-Hak Tenaga Kerja Kontrak (Outsourcing)*, (Jakarta: VisiMedia, 2009), Hal. 68

<sup>32</sup> Meiki Permana, *Degradasi Lingkungan Pendekatan Kajian Pembangunan Yang Berkelanjutan*, (Yogyakarta: PT Nas Media Indonesia, 2021), Hal. 29

g. Jumlah Penduduk

Penduduk menurut BPS adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Jawa Timur selama 1 Tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 Tahun tetapi memiliki tujuan untuk menetap.<sup>33</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Bagian awal terdiri dari, halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman moto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman transliterasi dan halaman abstrak.

### Bab I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari, latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan skripsi. Bab pendahuluan dijelaskan permasalahan yang akan menjadi latar belakang penelitian dari judul yang diambil peneliti. Dari latar belakang tersebut nantinya akan berkaitan dengan landasan teori bab 2.

---

<sup>33</sup> <https://www.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html>, diakses tanggal 21 Desember 2022 pukul 19.01 WIB

## Bab II Landasan Teori

Bab ini terdiri dari, membahas tentang Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum, Rasio Gini, Jumlah penduduk dan Tingkat Kemiskinan. Selain itu pada bab 2 ini juga membahas hasil penelitian terdahulu, kerangka konseptual, hipotesis penelitian.

## Bab III Metode Penelitian

Bab ini terdiri dari, pendekatan penelitian, dan jenis penelitian, populasi, dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrument penelitian, analisis data.

## Bab IV Hasil Penelitian

Hasil Penelitian terdiri dari, hasil penelitian yang berisikan deskripsi data dan pengujian hipotesis serta temuan penelitian.

## Bab V Pembahasan

Bab ini berisi hasil penelitian terdiri dari, menjawab masalah penelitian dan menjelaskan implikasi-implikasi dari hasil penelitian termasuk keterbatasan temuan penelitian.

## Bab VI Penutup

Bab ini menyajikan secara singkat apa yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, terangkum dalam bagian kesimpulan. Pada bab ini diakhiri dengan saran yang berguna bagi peneliti selanjutnya.